

PENGEMBANGAN MASYARAKAT DESA TERTINGGAL BERBASIS KETERPADUAN DAN OTONOMI DAERAH (Studi Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Gedangsari Gunung Kidul)

*S. Wisni Septiarti dan Widyaningsih **

ABSTRAK

Tulisan ini merupakan kajian atas hasil penelitian yang dimaksudkan untuk menggambarkan kawasan desa tertinggal di Gedangsari, salah satu kecamatan di Gunung Kidul. Kajian ini tentang desa tertinggal yang sebagian besar didominasi oleh perbukitan dan berkapur ini difokuskan pada aspek social ekonomi hingga pemberdayaan masyarakat khususnya keterlibatan masyarakat dalam pembangunan.

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang didahului dengan pra survey, metode indepth interview, metode penjajakan cepat mengenai desa (Participatory Rural Appraisal) serta penerapan Focus Group Discussion diharapkan kajian pemberdayaan masyarakat menjadi lebih komprehensif. Penggabungan beberapa metode ini digunakan untuk menjangkau data-data yang diperlukan serta kemungkinan tercapainya dialog antara kelompok-kelompok masyarakat baik di tingkat kecamatan maupun desa. Sumber data adalah para tokoh masyarakat, aparat pemerintahan serta warga masyarakat yang tergabung dalam unit pemberdayaan. Data yang dikumpulkan diklasifikasi sesuai jenis dan sifatnya, direduksi dan dianalisis serta diinterpretasikan secara deskriptif kualitatif hingga tertuang dalam tulisan ini.

Beberapa butir temuan penting dari kajian ini bahwa masyarakat yang berbukit, berkapur dan sebagian besar adalah petani (1) memiliki kesadaran akan keteringgalannya sehingga secara bersama-sama dalam kelompok, swadaya maupun bersama aparat pemerintah desa melakukan deversifikasi usaha dengan berbagai cara antara lain peningkatan ketahanan pangan, peningkatan usaha produktif bidang kerajinan, serta pemberdayaan melalui system kelembagaan (organisasi social), paguyupan, pemuda kelompok petani serta kelembagaan untuk peningkatan partisipasi masyarakat. (2) Keterpaduan dan Otonomi Daerah sebagai bagian proses pemberdayaan tidak sepenuhnya dapat diimplementasikan oleh karena beberapa kendala antara lain: pemahaman pada kedua konsep tersebut berbeda-beda, belum adanya penjabaran atas model itu serta kesenjangan antara banyaknya program yang belum terimplementasi dengan rencana strategis yang tersusun secara bottom up. Di sisi lain kompleksitas penerapan otonomi daerah secara sosio cultural menjadi kendala implementasi keterpaduan dan otonomi daerah. Namun demikian otonomi dan keterpaduan bukanlah menjadi isu penting bagi proses pemberdayaan oleh karena model pengembangan desa tertinggal melalui pemberdayaan individu maupun dinamika kelompok merupakan perpaduan kombinatorial yang sustainable

Kata kunci: Keterpaduan, Otonomi Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat

Pendahuluan

Para ahli ilmu sosial dan politik sepakat bahwa akar permasalahan terjadinya krisis multidimensi di Indonesia adalah kelengahan para perencana dalam memilih model pembangunan yang sentralistik dan otoriter yang mengedepankan pertumbuhan dan peran negara (*the state*) secara berlebihan. Sebuah pembangunan pada umumnya membawa konsekuensi pada terjadinya perubahan-perubahan sosial dan meningkatnya *defisiensi* struktur sosial yang berakibat pada terganggunya integrasi sosial (Sunyoto Usman, 2001).

Untuk mencapai keberhasilan pembangunan yang ditargetkan tersebut, pendekatan pemberdayaan masyarakat berbasis keterpaduan dan otonomi daerah menjadi sangat relevan seiring dengan asas demokrasi, partisipasi sebagai bagian dari *style of development*. Dalam memahami pembangunan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat, ditemukan sejumlah pengetahuan faktual mengenai beberapa hal antara lain:

1. Aspek fisik seperti perbukitan yang berkapur dapat memberi kemanfaatan tertentu.
2. Pengetahuan tentang potensi SDA dan SDM, permasalahan-permasalahan serta kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang berkaitan dengan pemberdayaan
3. Pengetahuan masyarakat yang berkaitan dengan ragam mata pencaharian, tingkat pendidikan, tingkat mobilitas serta akses atau kemudahan dalam proses mobilitas, tingkat sosial ekonomi.
4. Pemahaman terhadap kehidupan serta mengenali kebutuhan masyarakat

Masyarakat yang selama ini hidup dalam ketertinggalannya belum mampu mengikuti pola pemberdayaan yang terpadu sebagai

style of development oleh karena beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Masih belum optimalnya pemerintah kabupaten dalam memberdayakan masyarakat khususnya dalam pengembangan sumber daya manusia.
2. Masyarakat masih terbelenggu oleh permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan primer atau ekonomi subsistem.
3. Model pembangunan yang sentralistik menjadikan masyarakat menjadi tidak kreatif dan tergantung pada apa yang berasal dari pemerintah kabupaten saja.

Sebagaimana diuraikan pada latar belakang meskipun Gedangsari diklasifikasi sebagai desa tertinggal namun secara umum wilayah-wilayah tertentu yang terbukti dengan kayu hutannya dan berbatuan potensial secara ekonomi untuk dikembangkan sebagai daerah penghasil kerajinan. Seringkali potensi tersebut tidak berkembang optimal karena keterbatasan kemampuan sumber daya manusia, misalnya dalam mengolah, memasarkan serta pemilikan modal. Keadaan ini justru memunculkan terjadinya eksploitasi sumber daya alam yang tidak ramah lingkungan oleh pemilik modal. Pengembangan masyarakat melalui pemberdayaan yang berorientasi pada keterpaduan dan otonomi menjadi fokus kajian: 1) Bagaimana bentuk pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada keterpaduan dan otonomi daerah sehingga proses pembelajaran masyarakat dengan mengembangkan pemahaman dan pengetahuan mengenai masyarakat sendiri. 2) Hambatan dalam implementasi pengembangan masyarakat dengan model keterpaduan dan otonomi daerah sebagai pendekatan pemberdayaan masyarakat. Analisis ini bertujuan untuk: 1)

Memperoleh gambaran mengenai potensi dan permasalahan yang dihadapi masyarakat desa tertinggal. 2) Menemukan pola pengembangan masyarakat yang dapat memberdayakan potensi yang menjadi bagian dari masyarakat desa tertinggal melalui *focus discussion group*.

Kajian Pustaka

Makna Pemberdayaan Masyarakat

Empowerment, yang dalam bahasa Indonesia berarti pemberdayaan adalah sebuah konsep yang lahir sebagai bagian dari perkembangan cara berpikir masyarakat oleh karena dampak dari globalisasi. Onny S. prijono dan A.M.W. Pranoko (1996:3), pemberdayaan dari kata *empower* berarti *to give power or authority to* artinya sebagai memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan, atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain. Pengertian lain adalah *to give ability to or enable* artinya upaya untuk memberi kemampuan atau keberdayaan.

Dalam Sunyoto Usman (1998: 25-28), terdapat beberapa dimensi sebagai referensi dilaksanakannya proses pemberdayaan adalah: 1) Secara akademik harus nalar, dapat ditelaah dengan perspektif yang dipergunakan serta jelas variabel-variabel yang diperhitungkan. 2) Secara lebih politis lebih *concern* pada kepentingan masyarakat dan tidak menimbulkan pergolakan. 3) Secara kultur, tidak merusak atau mengorbankan nilai sosial yang hidup dalam masyarakat serta tidak menimbulkan kerentanan solidaritas sosial.

Pemberdayaan masyarakat dalam konteks pembelajaran menurut Compton dan McClusky (1997: 227) dengan pendekatan *community education for development* digambarkan sebagaia

process whereby community members come together to identify their problems and needs, seek solutions among themselves, mobilize the necessary resources and execute a plan of action or learning or both.

Pendekatan ini digunakan dalam praktek pemberdayaan masyarakat desa tertinggal agar individu dalam kelompok memiliki kemampuan saling membelajarkan. Proses pemberdayaan ini bermakna bagi masyarakat dalam mengembangkan pemahaman dan pengetahuan terhadap masyarakatnya sendiri serta mempersiapkan masyarakat untuk aktif dan tanggap terhadap hidup dan kehidupan. (Sutaryat, 2005: 6-11; Tilaar, 1999).

Keterpaduan dan Otonomi Daerah sebagai model pemberdayaan masyarakat

Pergeseran tata pemerintahan dari bentuk awalnya yang sangat sentralistis menuju ke desentralisasi serta ditegaskan dalam konteks otonomi daerah telah membawa perubahan yang substansial. Kewenangan, tanggung jawab dan keleluasaan berprakarsa untuk pengembangan potensi daerah telah berada sepenuhnya berada dalam kancan publik untuk berkembang menuju model pembangunan yang menjanjikan. Pergeseran tersebut telah pula memunculkan tekad pembangunan pada hampir semua tingkat pemerintahan kabupaten untuk mengambil inisiatif pengembangan bagi potensi alternatif berdasarkan karakteristik kawasan masing-masing. Komitmen pemerintah ditunjukkan dengan menempatkan pentingnya revitalisasi sektor pertanian dan pedesaan dalam prioritas utama kerangka besar pembangunan 2006, setelah upaya penanggulangan kemiskinan dan pengangguran dalam konteks pembangunan melalui pemberdayaan daerah (Maksum, 2004; Kompas, 25 Mei 2005).

Perangkat keputusan politik melalui UU 22 tahun 1999 yang pelaksanaannya dimulai 1 Januari 2001 telah melahirkan sisi positif yaitu tampak dengan semakin meningkatnya kualitas pelayanan publik misalnya kesehatan, pendidikan, sarana transportasi, serta keleluasaan rakyat memilih sendiri gubernur, bupati dan walikota. Sayangnya otonomi daerah belum sepenuhnya dirasakan pada perbaikan ekonomi rakyat, kesejahteraan di daerah belum tampak secara signifikan apalagi merata di semua tingkatan, selain karena naiknya harga BBM hampir setiap tahun

Sentuhan pengembangan yang tidak mempertimbangkan konsep keterpaduan yang harus dipahami oleh setiap daerah, maka pengembangan ini akan mengalami kegagalan (*unsustainable*) bahkan tidak member keuntungan sosial ekonomi (*intangibile benefits of sosial and economy*). Secara mendasar, keterpaduan pengembangan masyarakat desa (tertinggal) didasarkan pemahaman bahwa entitas internal suatu sistem tidak lain adalah melihat masyarakat daerah /kabupaten sebagai satu kesatuan sosio kultural yang berarti relasi antara unsur-unsur pengetahuan lokal (*local knowledge*), *sumber daya alam*, *sumber daya manusia* serta *kelembagaan*.

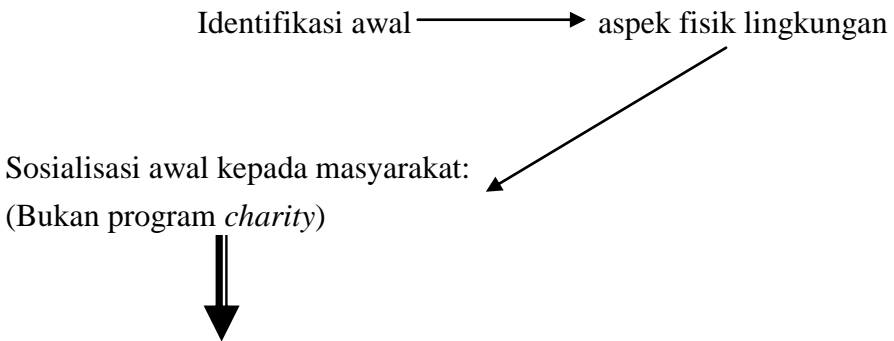
Beberapa komponen yang akan dijelaskan untuk memahami keterpaduan dalam mengembangkan masyarakat berarti: 1) Keterpaduan dalam hal nilai (*value*) sebagai prinsip pemberdayaan . Nilai ini diwadahi dalam beberapa hal seperti keagamaan, pengetahuan, dan kebiasaan. Nilai kemanusiaan, kepentingan bersama, dan prinsip dialogis dalam menegakkan kebersamaan. 2) Keterpaduan antar sektor, perencanaan, dan kegiatan sederhana sehingga mudah untuk dilakukan dengan melibatkan masyarakat.

Metode Penelitian

Kajian pemberdayaan masyarakat melalui otonomi dan keterpaduan ini dapat dijelaskan langkah operasional sebagai berikut:

1. Mengadakan sosialisasi yang berbentuk pertemuan dengan masyarakat sekaligus pendataan kebutuhan, permasalahan, serta harapan-harapan terhadap pengembangan perbukitan ini di tingkat kecamatan maupun desa.
3. Pembentukan kelompok berdasarkan kebutuhan dengan pendekatan *Participatory Rural Aprraisal* yang melibatkan masyarakat berpartisipasi dalam penentuan skala prioritas pembangunan yang ditindaklanjuti, *focus discussion group* yang menitikberatkan pada proses pemberdayaan, melalui *brainstorming*, , dan dialog.
4. Melakukan analisis sebab akibat masyarakat desa tertinggal.

Metode penelitian yang dipakai untuk studi pemberdayaan masyarakat adalah metode *indepth-interview*, *Participatory Rural Aprraisal*, dan *focus discussion group*. Ketiga metode ini digunakan untuk menjaring informasi agar terjadi dialog dan menekankan pada tercapainya proses pemberdayaan yang bersifat *bottom-up*. Alur metodologi dapat dilihat sebagai berikut:



1. *Koordinasi dengan berbagai tokoh masyarakat tingkat kecamatan.*

Untuk urusan perijinan dan kemungkinan berkoordinasi dengan masyarakat.

2. *Analisis Situasi dan Setting Penelitian*

Identifikasi kondisi-kondisi sosial kemasyarakatan melalui FGD dan PRA. Pemetaan dan identifikasi kelembagaan/unit pemberdayaan masyarakat.

Penelitian dilaksanakan di masyarakat kecamatan Gedangsari, kabupaten Gunung Kidul. Kecamatan Gedangsari terdiri dari 7 pedusunan dengan dominasi kawasan perbukitan yang berkapur. Dari tujuh pedusunan, dipilih 3 desa sebagai unit analisisnya dengan kriteria yang *paling jauh* dengan pusat kecamatan, *agak jauh* dan *dekat*. Pilihan ketiga desa tersebut juga diasumsikan bahwa Kecamatan Gedangsari dalam pemberdayaan didukung oleh tata pemerintahan yang telah memahami, menerima, dan mengimplementasikan kebijakan pemerintah yang berorientasi pada keterpaduan dan otonomi daerah. Asumsi dasar pemilihan ketiga desa penelitian ini adalah bahwa (1) semakin dekat dengan pemerintahan, akses terhadap pembangunan relatif lebih mudah; (2) desa yang berjarak paling jauh memiliki ketertinggalan yang lebih kompleks dibanding dengan desa lain; (3) ketika desa memiliki karakteristik kehidupan masing-masing, sehingga deversifikasi usaha untuk meningkatkan kesejahteraannya pun relatif bervariasi; (4) ketertinggalan desa di kecamatan ini berakibat pada rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.

Sebagai subyek penelitian adalah para tokoh masyarakat yang secara representatif memahami karakteristik desa serta perubahan sosial yang terjadi, dalam hal ini peneliti lebih banyak berhubungan dengan Sekretaris Kecamatan dan aparat bidang pembedayaan di

tingkat kecamatan. Tokoh masyarakat desa yang lain dalam hal ini diwakili kepala desa, ketua PKK, bidang kesejahteraan desa serta beberapa penggerak aktivitas desa seperti pemuda, kelompok atau paguyuban, petugas PKBM, LKMD, bahkan tenaga Lapangan Desa yang memiliki kepedulian dan keterlibatan dalam bidang PLS.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan wawancara. Metode observasi dan wawancara yang diperkuat dengan penajakan kajian pedesaan secara cepat (PRA) menjadi metode utama dalam mengumpulkan data yang berkaitan dengan potensi masyarakat, kebutuhan serta permasalahan-permasalahan yang dihadapi masyarakat sebagai desa tertinggal. Pengamatan yang dilengkapi dengan partisipasi juga menggunakan teknik diskusi kelompok agar terjadi dialog untuk memperoleh berbagai hal yang berkaitan dengan studi pengembangan masyarakat. Pengumpulan data juga dilengkapi dengan *indepth interview* agar ditemukan gambaran yang lebih realistis mengenai Gedangsari. Pedoman wawancara digunakan sebagai pelengkap atas pendalaman materi dengan wawancara. Data yang dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan deskriptif kualitatif.

Pembahasan

Topografi Kecamatan Gedangsari

Kecamatan Gedang sari Kabupaten Gunung Kidul yang terdiri dari 7 desa dipilih sebagai lokasi penelitian ini memiliki keunikan tersendiri. Sebagai gambaran, kondisi alam dan masyarakat yang ada di wilayah gedangsari Gunung Kidul dikategorikan sebagai daerah tertinggal (sumber: BPS, 2004, Bappeda, 2004, Kompas, 17 Juni 2005 tentang Hasil Identifikasi, sertifikasi dan validasi Asisten Deputi

Bidang I Kementerian Daerah Tertinggal, 2005) disebutkan bahwa sebuah wilayah disebut sebagai daerah tertinggal oleh karena beberapa kriteria sebagai berikut: 1) Pengembangan ekonomi bersifat lokal; 2) Pemberdayaan masyarakat yang masih sedikit, 3) Sumber daya manusia yang masih rendah, 4) Sarana dan prasarana yang belum memadai, 5) Daerah yang rawan terhadap bencana alam dan sosial

Tabel 1. Keadaan Penduduk Desa Hargomulyo, Mertelu, dan Ngalang Berdasarkan Jenis Kelamin dan Tumah Tangga

Karakteristik dan Jenis Kelamin	Hargomulyo	Mertelu	Ngalang
Kepala keluarga (jiwa)	1245	769	1276
Perempuan (jiwa)	3542	2278	3663
Laki-laki (jiwa)	3428	2118	3345

Dilihat dari mata pencaharian, petani yang memiliki lahan sendiri merupakan jenis pekerjaan utama bagi sebagian besar penduduk ketiga desa, kemudian diikuti jenis pekerjaan lain seperti wiraswasta, buruh peternak, PNS, TNI/POLRI, serta pensiunan sebagaimana tampak pada tabel berikut:

Tabel 2. Keadaan Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

No.	Mata Pencaharian	Hargomulyo	Mertelu	Ngalang
1	Petani	1044	2128	2243
2	Buruh bangunan, tani	135	45	33
3	PNS	21	12	19
4	Wiraswasta/pedagang	28	0	25

5	TNI/POLRI	6	1	1
6	Pensiunan	9	1	3
	jumlah	1243	2167	2324

Selain pertanian merupakan sistem mata pencaharian utama dan hal itu disebutkan dalam data kependudukan, namun pada kenyataannya sebagian penduduk di Desa Hargomulyo misalnya, kerajinan dari jenis batu-batuan memang merupakan sumber alam yang relif potensia untuk dikembangkan karena batu-batuan di daerah ini memiliki nilai ekonomi produktif dan nilai jual ekspor yang tinggi. Sistem ketahanan pangan dengan diversifikasi usaha tanaman umbi-umbian dan palawija juga menjadi alternatif pengembangan masyarakat atas dasar inisiatif sendiri, khususnya di Mertelu.

Sementara itu di masyarakat Desa Ngalang, penduduk lebih banyak mendiversifikasi usaha dengan memanfaatkan tanaman keras atau babmu untuk usaha produktif yaitu kerajinan anyam-anyaman dari bambu, kayu dan daun-daunan. Jenis-jenis kerajinan di kedua desa tampaknya tidak berkembang oleh karena keterbatasan modal, keterampilan dalam hal pemasaran serta pengembangan-pengembangan model yang layak pasar.

Bentuk Pemberdayaan dalam Konteks Keterpaduan dan Otonomi Daerah

1. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Sistem Kelembagaan

Desa sebagai satu institusi atau ruang publik untuk hidup bersama dengan suatu sistem gagasan tentang mata pencaharian, religioisitas, serta sistem relasi dari setiap individu yang menjembatani kepentingan sosial-ekonomi, politik, dan budaya dengan kekuasaan

wilayah di atasnya. Dari pengertian tersebut, desa memiliki peranan penting dan unik dalam sistem pemerintahan nasional, regional, dan lokal. Artinya sesuai dengan konsep Otonomi daerah dengan UU no. 32 dan 33 tahun 2004 serta keterpaduan antar sektor, kewilayahan serta nilai-nilai sosial budaya yang menjadi prinsip dasar pengembangan masyarakat, maka kewenangan untuk mengatur potensi dan kepentingan desa menjadi dikedepankan.

Camat beserta staf kecamatan hingga saat ini mengindikasikan belum berlakunya UU otonomi daerah no. 22 tahun 1999 bahkan UU no. 32 dan 33 tahun 2004 sebagai perundangan revisi oleh karena peraturan daerahnya tidak tersedia. Kegamangan atas terselenggaranya UU otonomi daerah ini juga dikarenakan: 1) Ketidakmampuan pemerintah kecamatan hingga desa dalam menjabarkan ke dalam kegiatan maupun programnya. Selain itu, overlapping fungsi kontrol pada program atau kegiatan masing-masing bidang dan sektor sering terjadi oleh karena pemahaman yang berbeda-beda atas UU Otonomi Daerah dengan pendekatan desentralisasinya. Misalnya apa fungsi kecamatan? Sebagai fasilitator atukah ada fungsi pelaksana sekaligus pengontrol. 2) Pemahaman atas rencana strategis Kabupaten yang harus dijabarkan ke dalam program dan kegiatan di tingkat desa tidak sama bahkan cenderung bersaing secara tidak sehat atas penjabaran skala prioritas implementasi pembangunan. 3) Penjabaran atas rencana strategi kabupaten ke wilayah kecamatan yang sudah dilakukan melalui musyawarah kecamatan dengan diawali oleh musyawarah desa sebagaimana diatur dalam alur perencanaan pembangunan seringkali berubah sama sekali setelah diproses di tingkat kabupaten.

Awalnya hasil rebug pembangunan kecamatan dipersiapkan untuk 2 tahun mendatang, namun mulai tahun 2005 hasil rebug

kecamatan dipersiapkan untuk tahun berikutnya. Adapun implementasi program atau kegiatan atas perencanaan yang berbasis pada otonomi dan keterpaduan ini melibatkan sistem organisasi kemasyarakatan seperti dinas pendidikan (PLS) melalui PKBM dengan peningkatan keterampilan dan pengetahuan bagi pemuda dan remaja, peningkatan pengetahuan dan keterampilan pemberdayaan kelompok-kelompok usaha melalui PKK, peningkatan partisipasi dalam proses perencanaan pembangunan melalui LKMD, atau peningkatan partisipasi BPD dalam proses pengambilan keputusan di tingkat kecamatan, serta PKM lain.

2. Pemberdayaan Masyarakat Berdasarkan Potensi Desa

Sarana transportasi pada wilayah-wilayah tertentu terpenuhi dengan pengaspalan atau pengerasan jalan secara swadaya maupun subsidi dari pemerintah, namun sebagian besar adalah atas inisiatif masyarakat termasuk pendanaannya. Desa ini memiliki potensi alam berupa perbukitan yang mengandung batu-batuan ziolit. Bebatuan ini oleh masyarakat setempat menjadi harapan bagi peningkatan kesejahteraan mereka. Hingga saat ini pengelolaan batu ziolit ini masih diolah secara belum maksimal, oleh karena belum adanya investor yang mengembangkannya.

Oleh karena kondisi tanah yang tidak subur, tanah menjadi sulit ditanami padi, maka sebagian besar tanah ditanami kedelai, jagung atau ketela yang mudah tumbuh di daerah seperti Mertelu ini. Desa yang masih tertinggal oleh karena kondisi geografis, tingkat kesejahteraan, tingkat pendidikan serta partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan relative tertinggal. Masyarakat secara swadaya,

memiliki inisiatif untuk melakukan deversifikasi usaha sebagai antisipasi terhadap kondisi alam yang gersang.

Pemilihan ketiga desa tertinggal sebagai diasumsikan semakin jauh dari kota kecamatan, kemandirian semakin tampak dinyatakan dalam aktivitas masyarakat khususnya di sector ekonomi produktif (terutama ketika terjadi bencana tanah longsor, gagal panen). Aktivitas ekonomi itu meliputi (1) Pembangunan baik di bidang pertanian, peternakan juga perkebunan, pendidikan serta mata pencaharian lain; (2) Keterlibatan pada proses perencanaan, pelaksanaan pemberdayaan secara individu maupun kelompok intesres yang diselenggarakan, misalnya peningkatan kualitas diri melalui pelatihan, pemagangan agar masyarakat memiliki keterampilan yang dapat digunakan sebagai bekal hidup masa depan yang lebih baik di masyarakat; (3) keterlibatan masyarakat desa dalam pengembangan kecamatan merupakan bentuk kepedulian masyarakat dengan pola desentralisasi.

Sebagai payung penelitian, hibah ini berhasil mengangkat tema-tema payung penelitian yang secara garis besar dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Untuk mengungkap lebih banyak mengenai potensi serta kebutuhan masyarakat untuk belajar dan mengembangkan diri serta lingkungannya, salah satu mahasiswa di desa Hargomulyo memperdalam need assessmennya dengan mengeksplorasi data-data yang berkaitan dengan potensi manusia dan potensi alam yang memberi peluang untuk peningkatan tingkat kesejahteraan
2. Pemberdayaan kelompok lansia yang berhasil diungkap melalui penelitian mahasiswa misalnya pada pemberdayaan ekonomi produktif bagi lansia, juga kapasitas fisik serta psikologis

termasuk kehidupan kerohanian lansia ditingkatkan agar para lansia menjadi lebih *percaya diri, sehat dan produktif*.

3. Bentuk pemberdayaan perempuan juga menjadi salah satu kegiatan yang dilakukan kelompok PKK agar kaum perempuan memiliki pengetahuan, keterampilan tertentu untuk menunjang kegiatan ekonomi produktifnya..
4. Remaja dan pemuda juga menjadi kelompok sasaran bagi upaya pemberdayaan masyarakat. Salah satu alasannya adalah kelompok pemuda dan remaja ini merupakan kelompok yang rawan akan pengaruh-pengaruh negatif, sehingga melalui karang taruna, kelompok remaja dan pemuda ini dibentuk untuk meningkatkan ketahanan fisik dan mentalnya dengan kegiatan-kegiatan seperti olah raga, kerohanian serta keterampilan-keterampilan yang berorientasi pada kewirausahaan seperti beternak.

Hambatan dalam Implementasi Pemberdayaan Yang Berbasis pada Otonomi Daerah dan Keterpaduan.

Dari uraian diatas jelas bahwa **kendala pertama** adalah pemahaman dan penjabaran atas makna desentralisasi, kewenangan serta keterpaduan belum sepenuhnya terjadi pada aparat pemerintahan bahkan yang memiliki kewenangan untuk terjadinya sosialisasi dan internalisasi peraturan perundangan yang berkait langsung dengan pemberdayaan masyarakat. **kendala kedua** apakah kompleksitas persoalan otonomi daerah yang mengamanatkan pada esensi desentralisasi maupun keterpaduan antar sector, bidang dan institusi ini lebih ditangkap sebagai peluang atau beban khususnya di tingkat kecamatan? **Kendala ketiga** yang dihadapi dalam implementasi pemberdayaan berbasis otonomi dan keterpaduan ini adalah tidak

responsifnya pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat. **Kendala keempat.**

Kesimpulan

Kecamatan Gedangsari dengan beberapa desa yang diklasifikasi sebagai desa tertinggal justru memacu masyarakat bersama aparat pemerintah setempat untuk melakukan upaya-upaya pemberdayaan. Pada awalnya dengan dukungan perundangan tentang otonomi daerah, keterpaduan, keberlanjutan, serta keserasian semakin memotivasi terselenggaranya pelaksanaan pengembangan masyarakat.

Pada tahap implementasinya, pemberdayaan masyarakat berbasis keterpaduan dan otonomi daerah mengandung beberapa kendala: (1) keberagaman persepsi atau pemahaman mengenai kewenangan daerah dan pusat; (2) kompleksitas persoalan otonomi dan keterpaduan berakibat pada beratnya beban yang disandang lembaga pemerintah seperti kecamatan; (3) kurang responsifnya pemerintah kabupaten akan kebutuhan masyarakat baik ketidaksesuaian dengan kebutuhan maupun lambatnya perangkat peraturan yang diberikan.

Saran

Dari kesimpulan di atas dapat disarankan sebagai berikut:

1. Memfungsikan kembali peran pemerintah kecamatan dan desa dalam sistem kelembagaan yang benar bagi terselenggaranya proses pemberdayaan.
2. Menyadari akan kelemahan konsep otonomi daerah dan keterpaduan. perlu secepatnya diselenggarakan sosialisasi secara komprehensif dengan dibarengi seperangkat peraturan sebagai pedoman pelaksanaan pemberdayaan ditingkat kecamatan atau dibawahnya agar pemahaman akan otonomi daerah, keterpaduan serta keberlanjutan semakin lengkap.

Daftar Pustaka

- Biro Pusat Statistik. 2003. *Kecamatan Gedangsari Kab. Gunung Kidul dalam angka*. Yogyakarta.
- Britha Mikkelsen. 2003. *Metode Penelitian Partisipatoris dan upaya-upaya Pemberdayaan*. Jakarta. Yayasan Obor Indonesia.
- Compton J.Lin & Howard Y.McClusky. 1997. "Community Education for Community Development (chapter 14) dalam Ite,J. (1997). *Community Development : Creating Community Alternatives – vision, analysis and practice*. Melbourne: Addison Wesley Longman Australis Limited.
- Chambers. Robert. 1996. *PRA. Memahami desa secara partisipatif*. Yogyakarta. Kanisius.
- Fasli Jalal & Dedi Supriadi. 2001. *Reformasi Prndidikan Dalam Konteks Otonomi Daerah*. Yogyakarta. Adicma Karya Nusa.
- Maksum.M. 2004. *Akar permasalahan krisis di Indonesia. Akibat Kebijakan perekonomian Memarjinalkan Sektor Pertanian dan Pedesaan*. Yogyakarta. Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan UGM.
- Onny S.Prijono dan A.M.W.Pranarka. 1996. *Pemberdayaan: Konsep, kebijakan dan Implementasi*. Jakarta, Centre For Strategic And International Studies.
- Sunyoto Usman. 1998. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.

